



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
INSPEKTORAT

Jl. Raya Bandara Juanda No. 8 Telp & Fax (031) 85595721  
SIDOARJO

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 800.1.11.1 /451.1/ 060 / 2024

- Dasar : 1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024.
- 2) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur.
- 3) Surat Pimpinan Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor B/763/GAH.00/10-16/02/2024 Perihal Pembuatan Akun E-Audit dan E-Purchasing

MEMERINTAHKAN :

- Kepada : 1. Nama : MANDALA ANUGERAH WAN FIRSTANTO, S.T., M.T., CFrA
- NIP : 19920106 201403 1 002
- Pangkat/Gol : Penata Tk. I (III/d)
- Jabatan : Auditor Ahli Muda diperbantukan di Umum dan Kepegawaian
- No. HP : 082123456192
2. Nama : RIANDONO PRAMAPUTRO, ST, M.MT, CFrA
- NIP : 19801116 201101 1 002
- Pangkat/Gol : Penata Tk. I (III/d)
- Jabatan : Auditor Muda
- No. HP : 08128089999
3. Nama : AGUNG SUBALI, ST, M. Ak, QGIA
- NIP : 19780521 200112 1 001
- Pangkat/Gol : Penata Tk. I (III/d)
- Jabatan : Auditor Muda
- No. HP : 081615060939
4. Nama : BENNY FAJAR UTAMA, SE, MM
- NIP : 19740526 200003 1 001
- Pangkat/Gol : Penata Tk. I (III/d)
- Jabatan : Auditor Muda
- No. HP : 08123252322
5. Nama : HAFIDH JAUHARI, M. Pd., MH., CPIA
- NIP : 19890408 201503 1 005
- Pangkat/Gol : Penata Tk. I (III/d)
- Jabatan : Auditor Muda
- No. HP : 085749592313

6 Nama : NESIA RAYI MARDASARI, S.Kom  
NIP : 19890417 201903 2 014  
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. I (III/b)  
Jabatan : Pengelola Teknologi Informasi  
No. HP : 087855595898  
7 Nama : KADEK OKA ARIANI, S.Kom  
NIP : 19840416 202221 2 003  
Pangkat/Gol : -  
Jabatan : Pranata Komputer Pertama (PPPK)  
No. HP : 081249280028

Untuk : Mendaftar sebagai pengguna fitur pengawasan pengadaan *E-Purchasing* melalui link <https://s.id/e-audit-daftar-akun>

Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat, agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya.

Dikeluarkan di : Sidoarjo  
Pada tanggal : 13 Februari 2024

**a.n. INSPEKTUR PROVINSI JAWA TIMUR**  
Sekretaris



**SYAMSUL HUDA, SH, MSI**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19750324 199503 1 004



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B/763/GAH.00/10-16/02/2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : Satu Berkas  
Perihal : Pembuatan Akun E-Audit dan E-Purchasing

06 Februari 2024

**Yth. Bapak/Ibu**  
**(Daftar Terlampir)**  
di tempat

Dalam rangka pelaksanaan aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi 2023-2024 khususnya aksi pengadaan barang dan jasa, telah dibangun fitur pengawasan untuk pengadaan *E-Purchasing* melalui E-Katalog yang bisa dimanfaatkan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) segera setelah diluncurkan dan disosialisasikan pada akhir Februari 2024.

Untuk memastikan kelancaran penggunaan fitur pengawasan *E-Purchasing*, diperlukan pembuatan akun bagi personel APIP sebelum kegiatan peluncuran dan sosialisasi berlangsung. Oleh karena itu, Saudara diharapkan:

1. Membuat surat tugas dengan menyertakan nama, Nomor Induk Pegawai (NIP) dan Nomor kontak (HP) dari personal APIP yang akan diberikan akses terhadap fitur pengawasan *E-Purchasing*. Surat tugas ini dapat disampaikan melalui <https://s.id/e-audit-daftar-akses> selambat-lambatnya tanggal 12 Februari 2024.
2. Mengarahkan personel yang ditugaskan tersebut untuk membuat akun auditor secara mandiri melalui link berikut <https://s.id/e-audit-daftar-akun> sebelum tanggal 16 Februari 2024.

Adapun akun ini bersifat personal sifatnya tidak dapat dibagi pakai dengan pihak lain sehingga tidak dibatasi jumlah akun di masing-masing instansi. Mengingat urgensi dari pengawasan pengadaan barang dan jasa khususnya pengadaan menggunakan E-Katalog diharapkan perhatian dan kerjasama Saudara.

Koordinasi dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdri. Karina Jonatan telepon 021-25578300 Ext. 8014, HP. 0812-8056-1850, atau alamat e-mail [stranaspk@kpk.go.id](mailto:stranaspk@kpk.go.id).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Pimpinan  
Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring  
selaku Koordinator Pelaksana  
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi,



*Dokumen ini ditandatangani secara digital*

Pahala Nainggolan

Tembusan:  
Yth. Inspektur KPK

**Lampiran I**

Nomor Surat : B/763/GAH:00/10-16/02/2024

Tanggal : 06 Februari 2024

**Daftar Penerima Surat**

1. Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan
3. Inspektur Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika
4. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian
5. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan
6. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
7. Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
8. Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian
9. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri
10. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
11. Inspektur Jenderal Kementerian Sosial
12. Inspektur Jenderal Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
13. Inspektur Provinsi Aceh
14. Inspektur Provinsi Bali
15. Inspektur Provinsi Bangka Belitung
16. Inspektur Provinsi Bengkulu
17. Inspektur Provinsi Riau
18. Inspektur Provinsi Kepulauan Riau
19. Inspektur Provinsi Jambi
20. Inspektur Provinsi Lampung
21. Inspektur Provinsi Sumatera Utara
22. Inspektur Provinsi Banten
23. Inspektur Provinsi DI Yogyakarta
24. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
25. Inspektur Provinsi Jawa Barat
26. Inspektur Provinsi Jawa Tengah
27. Inspektur Provinsi Jawa Timur

28. Inspektur Provinsi Kalimantan Barat
29. Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan
30. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah
31. Inspektur Provinsi Kalimantan Timur
32. Inspektur Provinsi Kalimantan Utara
33. Inspektur Provinsi Gorontalo
34. Inspektur Provinsi Sulawesi Barat
35. Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan
36. Inspektur Provinsi Sulawesi Tengah
37. Inspektur Provinsi Sulawesi Tenggara
38. Inspektur Provinsi Sulawesi Utara
39. Inspektur Provinsi Sulawesi Barat
40. Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan
41. Inspektur Provinsi Maluku
42. Inspektur Provinsi Maluku Utara
43. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Barat
44. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur
45. Inspektur Provinsi Papua
46. Inspektur Provinsi Papua Barat